

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN NONFORMAL TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK BERKUALITAS

INFLUENTIAL FACTORS OF NONFORMAL EDUCATION DATA COLLECTION WAS NOT TIMELY AND QUALIFIED

Ida Kintamani Dewi Hermawan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kemdikbud

Jl. Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat

Email: idakintamani@yahoo.com

Diterima tanggal:02/04/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal:06/06/2012, Disetujui tanggal:05/07/2012

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengumpulan data pendidikan nonformal (PNF) tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Metode yang digunakan yakni survei dengan populasi dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh faktor, yaitu pemahaman pendataan, sumber daya manusia, dukungan dinas pendidikan kabupaten/kota, dana, infrastruktur pendataan, monitoring dan evaluasi, dan kondisi geografis yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas, terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhi. Keempat faktor tersebut ialah dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota (26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana (32,25%), dan infrastruktur (39,40%). Bila ketujuh variabel tersebut digabungkan, maka rata-rata sebesar 36,75% berarti juga sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Dengan demikian, disarankan agar ada dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap pendataan PNF, monitoring dan evaluasi pendataan PNF di tingkat satuan pendidikan sampai kabupaten/kota dapat dilaksanakan, dukungan dana bagi pengelola pendataan PNF dan peningkatan infrastruktur, baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Kata kunci: pendidikan nonformal (PNF), pengumpulan data, tidak tepat waktu, tidak berkualitas, dan dukungan dinas

Abstract: The purpose of this research is to find out the cause of the factors in the Non-formal education collection of data not timely and not quality. The method used is the population of the survey in office of education at district level throughout the country. The taking of a sample of the method used is a purposive sampling techniques and of analysis with a descriptive . The result showed that seven of the factors, these are the understanding , human resources , the support of the office of education at district level, the fund, monitoring and evaluation , infrastructure; and geography affect the collection of data of Non-formal education not timely and not quality and there are four factors that are strongly influence. The four factors are the support of the office of education at district level (26,00%), monitoring and evaluation (31,57%), funding (32,25%), and infrastructure (39,40%). When these variables are combined then the average by 36,75% means also greatly affects the data collection of the Non-formal education did not timely and not quality. Thus, it is recommended that the support of the Non-formal Education service by Office of education at district level, monitoring and evaluation at the unit level in the case of the Non-formal Education can be implemented. In addition, the necessary support funding for the logging manager and and the improvement of the infrastructure both in quantity as well as quality.

Keywords: nonformal education, data collection, not on time, not qualified, and official support

Pendahuluan

Pada tahun 2010, Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), memiliki tugas untuk melaksanakan sistem pendataan pendidikan nasional termasuk PNF. Selain itu, tugas dan fungsi PSP yaitu untuk menyediakan data yang berkualitas dalam arti data yang akurat dan diperoleh secara tepat waktu di sektor pendidikan. Data yang berkualitas tersebut diperoleh melalui sistem pendataan Pendidikan Nasional. Data tersebut digunakan oleh para pembuat keputusan, para perumus kebijakan, dan para perencana pendidikan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Pada masa sebelum otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan (sekitar tahun 1990an) setiap satuan pendidikan (satdik) melaporkan secara rutin setiap bulan dalam bentuk laporan bulanan kepada kantor pendidikan kecamatan (Kancam pendidikan). Selain itu, setiap setahun sekali satdik mengisi kuesioner satdik yang disebut Li (Laporan Individu) yang dikirimkan dari Pusat. Selanjutnya, setelah mengisi kuesioner, satdik mengirimkan ke kancam pendidikan. Kancam pendidikan merangkum data satdik di daerahnya dan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdik dan rangkuman data satdik ke kantor departemen (Kandep) kabupaten/kota, istilah pada waktu itu.

Kandep kabupaten/kota juga merangkum data dari setiap kancam pendidikan di daerahnya dan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdik, rangkuman tiap satdik, dan rangkuman tiap kecamatan ke kantor wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi, istilah pada waktu itu. Dari kanwil ini, isian kuesioner, rangkuman tiap satdik, rangkuman tiap kecamatan, dan rangkuman tiap kabupaten/kota dikirimkan ke pusat melalui PSP di tingkat nasional.

Aliran pengumpulan data pendidikan ketika sebelum otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan terlihat sangat lancar dan tertib, karena secara organisasi kandep dan kanwil kala itu merupakan organisasi/lembaga perpanjangan tangan dari kementerian atau Pemerintah Pusat yang menjalankan fungsi administrasi sektor sesuai dengan asas dekonsentrasi. Oleh karena itu, apa pun dan kapan pun data pendidikan diminta oleh Pusat, akan cepat kembali

disampaikan kepada instansi yang meminta data di Pusat.

Sejak diterapkan otonomi daerah, kandep-kandep pendidikan tersebut dilebur dengan unit-unit organisasi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya dikenal sebagai dinas pendidikan kabupaten/kota. Masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan di tingkat kecamatan. Sementara itu, kanwil-kanwil dilebur dengan unit-unit organisasi pemerintah daerah di tingkat provinsi menjadi dinas pendidikan provinsi. Sejak kantor kandep dan kanwil tersebut dilebur, semua hubungan pelaporan yang bersifat hirarkis antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dengan pemerintah pusat/nasional menjadi hilang. Hilangnya hubungan yang hirarkis seharusnya tidak perlu terjadi, karena bagaimana pun dalam otonomi daerah terdapat urusan pemerintahan bersama (*concurrent*) yang bersifat wajib (*obligatory*) atau pelayanan dasar, di mana pendidikan merupakan salah satu sektor di dalamnya. Hal ini masih bisa berjalan jika terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, termasuk interkoneksi dan interdependensi antara ketiga tingkatan pemerintahan. Namun, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor pendidikan merupakan sektor yang tidak begitu jelas pembagian peran dan tanggung jawab antara ketiga tingkatan pemerintahan. Akibatnya, kondisi yang tidak jelas ini juga ikut berpengaruh terhadap pengembalian data pendidikan melalui kuesioner tahunan yang dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

Walaupun terjadi desentralisasi pendidikan, sesungguhnya Pemerintah Pusat tetap memerlukan data yang akurat dan tepat waktu tentang sektor pendidikan untuk tujuan perencanaan nasional ataupun penentuan keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat nasional. Namun, setelah otonomi pendidikan banyak daerah (kabupaten/kota) yang tidak menyerahkan data pendidikan ke Pusat. Penurunan persentase daerah yang menyerahkan data pendidikan ke Pusat mencapai hingga kurang dari 50%. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh beberapa kabupaten/kota menurunkan tingkat organisasi (jabatan/eselon)

yang terkait dengan pengolahan data atau bahkan menghapus unit data dari struktur dinas pendidikan di kabupaten/kota, melainkan juga terjadi karena banyaknya daerah pemekaran kabupaten/kota baru yang terpisah. Dari tahun 1999 sebelum otonomi sebesar 349 kabupaten/kota dan sampai tahun 2010 terdapat 497 kabupaten/kota, sehingga hasil pemekaran sebesar 148 kabupaten/kota atau jika dipersentasekan mencapai 42,4% (BPS, 2010). Pemekaran berdampak tidak hanya pada unit organisasi dan sumber daya manusia yang harus dibagi, melainkan juga menyangkut data yang harus disesuaikan antara induk kabupaten/kota dengan kabupaten/kota hasil pemekaran. Akibat lebih jauh terhadap pengumpulan atau pengembalian data pendidikan menjadi lebih kompleks, terutama bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan kinerja dan merumuskan kebijakan sektor pendidikan yang berbasis data.

Permasalahan cukup klasik lainnya yang biasa terkait dengan pengembalian data pendidikan, yaitu banyak pihak dari sektor yang sama meminta data yang sama tanpa koordinasi yang jelas dan terintegrasi, sehingga menimbulkan “penumpukan” permintaan data di tingkat pelaksana, dalam kasus ini terjadi pada beberapa satuan pendidikan. Sebagai ilustrasi, misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI/sekarang menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal/Ditjen PAUDNI) memiliki data pendidikan nonformal (PNF) yang relatif jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan PSP. Hal yang sama terjadi pula dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) memiliki database yang lengkap jika dibandingkan dengan PSP terkait dengan jumlah peserta didik, prasarana dan sarana pendidikan. Analisis sementara menunjukkan bahwa kemungkinan kedudukan PSP di bawah Balitbang tidak menguntungkan dalam mengharuskan daerah untuk mengembalikan data pendidikan termasuk data PNF tahunan. Hal ini akibat direktorat memiliki dana yang lebih besar guna pembinaan satuan pendidikan daripada PSP yang hanya mengatur data pendidikan termasuk data PNF. Untuk itu, dengan adanya reformasi birokrasi internal (RBI), PSP diubah menjadi Pusat Data dan Statistik

Pendidikan (PDSP) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, 2010d). Namun, dalam kajian berikut belum menggunakan PDSP karena yang dikaji adalah pengumpulan data tahun 2010 yang masih dilaksanakan oleh instansi PSP, Balitbang.

Dari paparan paragraf-paragraf di atas, terdapat banyak faktor yang menjadi kendala bagi partisipasi daerah dalam menyerahkan/mengembalikan data di sektor pendidikan di daerah mereka masing-masing ke PSP. Secara umum, beberapa faktor penyebab dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, faktor substansial, mencakup konsep dasar data pendidikan dan kebijakan yang melandasi, mekanisme pengumpulan dan pengaturan peran para pihak sesuai urusan pemerintahan di setiap tingkat pemerintahan, pengelolaannya hingga pemanfaatan data. Kedua, faktor sistem dukungan, termasuk sumber daya manusia, penganggaran, rancang-bangun sistem dan infrastruktur informasi dan teknologi (IT). Ketiga, faktor perilaku, sikap dan kepemimpinan, khususnya jiwa kepemimpinan yang sadar akan arti pentingnya data (dalam hal ini data pendidikan) dan sadar akan kepemilikan data yang tepat waktu dan berkualitas untuk perencanaan maupun pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Kecenderungan tingkat pengembalian data kabupaten/kota yang rendah, tidak tepat waktu dan data tidak berkualitas, dengan sendirinya merupakan salah satu indikator bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem pemerintahan, sehingga berdampak pada sistem pendataan yang ada. Studi ini akan menggali dan menguji mengapa tingkat pengembalian data PNF tahunan sangat rendah, pada sistem sesuai dengan tiga tingkatan pihak yang harusnya berperan dalam proses pengisian dan pengembalian data PNF, yaitu satuan pendidikan PNF, UPTD kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dirumuskan adanya permasalahan sebagai berikut: 1) Mengapa terdapat dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, UPTD pendidikan, dan satuan pendidikan yang tidak dapat mengum-

pulkan kembali instrumen data PNF tahunan secara tepat waktu dan berkualitas?, dan 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi nasional di PSP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, UPTD pendidikan, dan satuan pendidikan dalam memberikan data PNF yang berkualitas dan tepat waktu?

Sebagai langkah awal, studi ini mengasumsikan bahwa para pengelola pendidikan di pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan dari pengumpulan data PNF. Atas dasar pertimbangan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu faktor-faktor kunci apakah yang berpengaruh terhadap pengumpulan data PNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Kajian Literatur

Beberapa Istilah dan Pengertian dalam Pendataan

Untuk memahami faktor-faktor penyebab pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas, perlu diketahui terlebih dahulu tentang apakah yang disebut pendataan pendidikan. Pendataan pendidikan penting dipahami karena pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam pendataan pendidikan. Kemudian perlu dijelaskan tentang apakah yang termasuk dalam PNF dan diakhiri dengan pengertian tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Agar diperoleh data yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pendidikan, diperlukan rangkaian kegiatan pendataan pendidikan. Pendataan memiliki arti bermacam-macam dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu perkembangan tersebut, yaitu pendataan pendidikan dikaitkan dengan adanya otonomi pendidikan. Berdasarkan kegiatan pendataan pendidikan yang dikaitkan dengan otonomi pendidikan pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya, pendataan pendidikan terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu produksi data dan pendayagunaan/pelayanan data. Bahasan berikut hanya dibatasi tentang produksi data, hal ini terkait erat dengan judul penelitian, yaitu tentang pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan proses menghimpun data dari sumber data dengan menggunakan berbagai instrumen penjaring data atas dasar waktu hitung dan mekanisme pendataan tertentu. Sumber data adalah orang-perorangan atau lembaga yang ditetapkan menjadi responden pendataan. Instrumen penjaring data pada umumnya berupa berkas formulir/dokumen pelaporan yang harus diisi oleh sumber data. Waktu hitung pendataan adalah tanggal atau periode waktu tertentu yang ditetapkan sebagai waktu penghitungan data, misalnya untuk persekolahan adalah 31 Agustus dan PNF adalah 31 Desember. Mekanisme pendataan adalah arus yang digunakan dalam penyebaran dan pengembalian instrumen penjaring data. Dalam mekanisme pendataan ini terkandung pula waktu/jadwal pelaksanaan dan rincian lingkup kerja pendataan yang harus dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengumpulan data ini adalah terkumpulnya kembali seluruh berkas instrumen penjaring data yang telah diisi oleh sumber data.

Pengolahan data merupakan rangkaian proses untuk memindahkan seluruh hasil pengumpulan data dalam sistem penyimpanan data elektronik. Dalam pengolahan data ini terdapat enam kegiatan pokok, yaitu: 1) administrasi data; 2) penyuntingan, 3) kodefikasi, 4) penandaan, 5) perekaman data, dan 6) pembersihan data. Administrasi data adalah mencatat, mengatur, dan mendokumentasikan setiap berkas instrumen penjaring data yang telah terkumpul agar memudahkan dalam melakukan pengambilan dan penyimpanan data kembali. Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki atau memperjelas isian pada berkas instrumen penjaring data agar tidak terjadi salah interpretasi. Kodefikasi dilakukan terhadap beberapa jenis variabel data yang sangat penting apabila pengolahan data menggunakan komputer.

Penandaan adalah memberikan tanda terhadap data/kelompok data agar memudahkan dalam memasukkan data ke perangkat komputer. Perekaman adalah proses memasukkan data dari berkas penjaring data ke dalam sistem komputer yang dilakukan oleh beberapa operator dengan beberapa perangkat komputer. Pembersihan data dilakukan terhadap hasil perekaman data untuk

menjamin agar data yang terekam dalam komputer benar-benar sama dengan yang tercantum dalam instrumen penjaring data. Hasil kegiatan pengolahan data adalah terekamnya seluruh hasil pengumpulan data dalam sistem komputer. Hasil rekaman ini disebut data mentah.

Pada tahap pengumpulan data dan pengolahan data diperlukan kegiatan monitoring. Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, dengan melakukan monitoring dapat memberdayakan dinas pendidikan provinsi selaku Koordinator Pendataan Pendidikan di tingkat provinsi. Monitoring yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu 1) monitoring provinsi-kabupaten/kota dan 2) monitoring pusat-provinsi.

Monitoring provinsi-kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan pihak yang dimonitor, yaitu setiap dinas pendidikan kabupaten/kota di wilayahnya. Petugas pelaksana monitoring adalah anggota KK Data Dik, dinas pendidikan provinsi untuk setiap dinas pendidikan kabupaten/kota di wilayahnya. Sasaran monitoring dan materi laporan tertulis merupakan realisasi kegiatan penjaringan dan pengolahan data yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dalam wilayahnya dan hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dicapai oleh tiap dinas pendidikan kabupaten/kota dalam wilayahnya yang diukur berdasarkan keabsahan, kelengkapan, dan keaktualan data.

Penyajian data merupakan langkah akhir dari kegiatan produksi data dan berdasarkan data mentah dilakukan serangkaian proses untuk menghasilkan berbagai produk berupa data/informasi pendidikan yang secara periodik harus diterbitkan dan dipublikasikan. Kegiatan pokok penyajian data, meliputi: 1) penyusunan naskah, 2) penggandaan/pencetakan, dan 3) pendistribusian. Penyusunan naskah terdiri atas empat kegiatan, yaitu 1) verifikasi, estimasi, dan perkiraan data, 2) tabulasi statistik, 3) penyusunan draft statistik, dan 4) finalisasi statistik. Naskah yang dihasilkan sangat bervariasi, namun pada umumnya berupa buku statistik pendidikan, buku saku, *leaflet*, *booklet* dan berkas-berkas data untuk bahan laporan tahunan/tengah tahunan. (Kemdiknas, 2010a).

Penelitian ini hanya sampai tahap pengumpulan kembali data ke pusat. Bila semua ini dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya terutama faktor monitoring dari provinsi ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke kecamatan maka tak akan terjadi permasalahan seperti pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Depdiknas, 2003).

Pendataan PNF yang selama ini dikelola dan dijangkau oleh PSP, Balitbang, Kemdiknas kala itu terdiri dari enam jenis, yaitu: 1) Pendidikan Keaksaraan; 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3) Pendidikan Kesetaraan yang mencakup Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA; 4) Pendidikan Berkelanjutan yang mencakup Kursus, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), dan Kelompok Belajar Usaha (KBU); 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Salah satu program penting dalam pendidikan keaksaraan, yaitu pemberantasan buta aksara yang juga merupakan salah satu prioritas Kemdiknas. Pendidikan keaksaraan diperlukan karena keterkaitan yang sangat erat dengan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan suatu bangsa. Seperti dijelaskan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 menggunakan salah satu indikatornya, yaitu Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas (AMH). Selain itu, dapat dikatakan bahwa semakin banyak penderita buta aksara di suatu negara semakin miskin pula negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil penderita buta aksara semakin maju pula suatu negara.

Program PAUD membatasi pada anak usia antara 0 sampai 6 tahun dan merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak serta pengembangan intelegensi permanen untuk menyerap informasi. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. PAUD terdiri dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi isi, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (*delivery system*) dirancang sedemikian rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komperehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Pendidikan kesetaraan terdiri dari Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Paket A dan Paket B dirancang untuk menunjang suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas) dengan prioritas anak usia Wajar Dikdas (7-15 tahun). Paket A dan Paket B memberi kesempatan bagi orang dewasa yang belum memiliki pendidikan

setara pendidikan dasar 9 tahun. Paket C setara SMA dirancang untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang belum memiliki pendidikan setara SMA. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum SMA jurusan IPS. Bahan belajar disusun dalam bentuk modul, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar mandiri.

Pendidikan berkelanjutan ada tiga program, yaitu Kursus, PKH, dan KBU. Kursus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sumber daya yang terampil dan profesional. *PKH adalah pendidikan ke-mampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang. Kecakapan hidup mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental.* KBU adalah program pembelajaran yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk belajar, bekerja dan berusaha, sebagai pelajaran pasca program KF, paket B dan paket C. Tujuan KBU, yaitu untuk memperluas kesempatan belajar usaha bagi masyarakat yang tidak mampu, agar memiliki penghasilan yang tetap, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lahir dari satu kesadaran bahwa lembaga persekolahan membuat banyak orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Untuk itu, PKBM diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sebagai sumber informasi yang andal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional, dan sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat. Sebagai salah satu institusi PNF atau pendidikan masyarakat dan

wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKBM bersifat fleksibel dan netral. PKBM disebut fleksibel, karena ada peluang bagi masyarakat untuk belajar apa pun sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di PKBM, warga masyarakat di bawah bimbingan tutor dapat secara demokratis merancang kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Dalam PKBM dapat diselenggarakan beberapa program pembelajaran yang beraneka ragam, seperti program KBU, pendidikan keaksaraan, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, kursus menjahit, kursus merias pengantin, kursus las, atau program keterampilan lainnya.

PKBM bersifat netral, karena tidak menggunakan atribut pendidikan masyarakat (Dikmas) atau pemerintah. Oleh karena itu, semua lembaga/instansi pemerintah atau swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak-pihak lain dapat memanfaatkan keberadaan PKBM sepanjang untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Misalnya, ada PKBM yang diselenggarakan oleh LSM, pesantren, atau lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta yang diprakarsai oleh perusahaan. Dalam hal ini, Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dit Dikmas) berperan memfasilitasi, sedangkan prakarsa ada pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan sumber Dit Dikmas, membaca sebenarnya merupakan proses belajar, sehingga masyarakat yang gemar membaca (*reading society*) akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) yang cerdas. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui perintisan dan penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa; pemberian *block grant* ke TBM untuk membeli buku-buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan TBM dan perpustakaan desa; diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di TBM, dan sebagainya. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, memang sudah sepatutnya ditindaklanjuti dengan kampanye gerakan membaca, khususnya di kalangan masyarakat lapis bawah. Membangun masyarakat gemar membaca merupakan bagian dari upaya menuju pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan nonformal. Membangun budaya baca melalui TBM merupakan program yang sangat

strategis. Prioritas sasaran pengguna TBM, yaitu warga belajar dari program-program pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara), program pendidikan kesetaraan (program Paket A setara SD, program Paket B setara SMP, dan program Paket C setara SMA).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan program pembelajaran dengan bentuk dan satuan yang diarahkan pada makna kesejatan belajar. Maksudnya, fokus materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik guna menunjang hidup dan penghidupannya. Program peningkatan budaya baca oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: 1) Terbentuknya TBM di seluruh pelosok daerah; 2) Bahan bacaan yang sesuai kondisi objektif masyarakat; dan 3) Tumbuhnya minat baca masyarakat (Kemdiknas, 2010c).

Sesuai dengan tujuan penulisan, pengumpulan data yang tidak tepat dan tidak berkualitas terjadi pada semua program di PNF karena instrumennya merupakan satu kesatuan.

Data Tepat Waktu

Data tepat waktu, berarti bahwa data harus tersedia pada waktu diperlukan. Dalam pendataan pendidikan persekolahan/pendidikan formal waktu penghitungan data adalah 31 Agustus dan pada bulan Oktober data sudah harus dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Waktu penghitungan pendataan PNF pada 31 Desember. Oleh karena itu, pada bulan Pebruari data sudah harus dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Bila data tersebut dikirimkan setelah bulan Oktober untuk pendidikan formal atau setelah bulan Pebruari untuk PNF, maka data tersebut dapat dikatakan tidak tepat waktu. Contohnya, untuk merencanakan rehabilitasi ruang kelas SD pada tahun 2010/2011 harus tersedia data mengenai: 1) karakteristik ruang kelas yang rusak ringan maupun berat, dan 2) kesiapan biaya untuk rehabilitasi pada tahun 2010. Bila terjadi kelambatan informasi tentang ruang kelas yang rusak, maka data tersebut tidak akan berguna lagi karena tidak tepat waktu. Dengan demikian, bila terjadi hal seperti itu maka dapat dikatakan data yang tidak tepat waktu (Kemdiknas, 2010a).

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penulisan, pengumpulan data PNF yang tidak

tepat waktu terjadi karena data PNF yang diperoleh tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan, yaitu pada akhir Februari.

Data Berkualitas

Mutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggap baik, karena memenuhi suatu standar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan menuju sesuatu yang baik atau standar tertentu. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan pada masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana, dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Mutu dapat ditingkatkan bila proses belajar-mengajar dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga peserta didik dapat mengalami proses belajar-mengajar yang berarti dan ditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Proses belajar yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang mampu belajar terus-menerus, sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Mengingat sangat pentingnya peranan data dalam pembangunan pendidikan khususnya untuk menyusun rencana dan program pembangunan pendidikan, maka data itu harus baik atau berkualitas. Kualitas data sangat tergantung dari cara seseorang dalam memperoleh data. Bila pengumpulan data dilakukan secara serampangan, maka data yang diperoleh tidak akan berkualitas, walaupun data tersebut adalah data primer yang berasal dari sumber data yang paling bawah.

Untuk data yang berkualitas, yaitu data yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1) objektif, 2) relevan, 3) representatif, dan 4) memiliki penyimpangan baku kecil. Ketiga kriteria terakhir (2, 3, dan 4) merupakan kriteria untuk data yang “dipercaya kebenarannya” (sahih dan reliabel). Guna pendataan diperlukan semua kriteria tersebut, sedangkan untuk penelitian atau survei diperlukan data yang relevan, representatif, dan memiliki penyimpangan baku kecil. Dengan demikian, bila kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka data dapat dikatakan tidak berkualitas (Kemdiknas, 2010b).

Sesuai dengan tujuan penulisan risalah ini, pengumpulan data PNF yang tidak berkualitas terjadi karena data yang diperoleh tidak dapat

dipercaya kebenarannya, misalnya jumlah pendidik PAUD sama dengan jumlah kelompok belajar, jumlah pengelola lebih besar daripada jumlah pendidik PAUD, jumlah kelompok belajar sama dengan jumlah lembaga.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, yaitu metode survei. Metode ini digunakan karena mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Menurut Creswel (2003), survei adalah studi yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan penelitian survei yakni studi dapat dilakukan generalisasi dari sampel terhadap populasi. Dengan kata lain, studi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan “mengapa dinas pendidikan kabupaten/kota tidak dapat mengumpulkan kembali atau mengembalikan data PNF kepada PSP secara tepat waktu dan berkualitas, dalam bentuk kuantitatif”. Dengan keperluan seperti ini, yang sudah sangat kecil lingkupnya, pilihan terhadap metode survei menjadi sangat penting, tepat, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dan berdasarkan data pada tahun 2010 sebanyak 497 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan secara purposif karena kondisi ke-497 dinas pendidikan kabupaten/kota sama, yaitu tidak mengirimkan kembali isian kuesioner PNF tahunan yang dikirimkan oleh PSP atau pengembalian isian kuesioner PNF kurang dari 50%.

Penentuan sampel terdiri atas sampel wilayah dan sampel responden sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Sebagai sampel wilayah dan sesuai dengan judul penelitian ini yang mengandung dua kriteria utama seharusnya dapat digunakan sebagai dasar bagi pengelompokan semua kabupaten/kota sebagai daerah yang “tepat waktu” dan “berkualitas” dalam pengembalian data PNF tahunan. Namun, karena adanya keterbatasan pada sistem *data base*, yaitu tidak

memiliki catatan waktu kapan *upload* data dari suatu daerah atau dinas pendidikan kabupaten/kota ke dalam sistem, maka tidak dapat memilah daerah kabupaten/kota mana saja menurut kriteria “ketepatan waktu”. Walaupun demikian, sesungguhnya ukuran ketepatan waktu sangat terukur dan pasti karena dalam statistik skalanya interval/rasio dan dalam pemodelan disebut sebagai variabel manifes. Oleh karena itu, batasan terlambat atau tidak terlambat disepakati sebagai satu kesatuan dengan tidak tepat waktu dan tidak berkualitas di setiap daerah (Gulo, 2002).

Variabel lain yang digunakan dalam penentuan sampel studi, yaitu lokasi/letak geografi. Kabupaten/kota perlu mewakili pula suatu daerah seluruh Indonesia, apakah wilayah daratan (pulau besar), wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil) atau kombinasi keduanya (pulau besar dan pulau kecil). Dengan demikian, pertimbangan pengambilan sampel mencakup pulau utama (pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil dan kombinasinya). Kepulauan Indonesia dikelompokkan dalam tujuh

kelompok, namun dua kelompok paling timur, yaitu Maluku dan Papua tidak diambil sebagai sampel dengan alasan biaya. Dengan demikian, jumlah pulau yang diambil sebagai sampel ada 5 (lima) pulau, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Untuk Jawa diambil sebanyak 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari empat provinsi tersebut diambil 10 kabupaten/kota dengan rincian 8 kabupaten dan 2 kota. Untuk Sumatera diambil tiga provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/kota. Untuk Kalimantan diambil dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat diambil satu kabupaten dan Kalimantan Tengah diambil satu kota. Untuk Sulawesi hanya Sulawesi Selatan yang diambil daerah barat dan daerah tengah. Daerah barat diambil satu kabupaten dan daerah tengah juga satu kabupaten. Untuk Nusa Tenggara diambil dua provinsi, yaitu Bali sebanyak satu kabupaten dan satu kota dan Nusa Tenggara Barat hanya satu kabupaten.

Tabel 1. Sampel Studi

No.	Pulau	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa	Jawa Barat	Kab. Ciamis	1	5.00
			Kab. Tasikmalaya	1	5.00
			Kab. Tangerang	1	5.00
		Jawa Tengah	Kab. Semarang	1	5.00
			Kota Salatiga	1	5.00
			Kab. Klaten	1	5.00
		DI Yogyakarta	Kab. Bantul	1	5.00
		Jawa Timur	Kab. Malang	1	5.00
			Kota Surabaya	1	5.00
			Kab. Sidoarjo	1	5.00
2	Sumatera	Kepulauan Riau	Kota Batam	1	5.00
		Bangka Belitung	Kab. Belitung	1	5.00
		Jambi	Kota Jambi	1	5.00
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	1	5.00
		Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	1	5.00
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	1	5.00
			Kab. Gowa	1	5.00
5	Nusa Tenggara	Bali	Kab. Badung	1	5.00
			Kota Denpasar	1	5.00
		Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	1	5.00
			Jumlah	20	100.00

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Kuesioner digunakan untuk menjangkau data primer yang akan meliputi variabel-variabel yang mempengaruhi pengumpulan data PNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup digunakan guna membatasi alternatif jawaban, sehingga jawaban akan fokus pada penelitian yang dilakukan. Pertanyaan terbuka dilakukan untuk melengkapi hasil isian pertanyaan tertutup. Untuk jenis pertanyaan terbuka dilakukan pula melalui wawancara agak mendalam, sehingga dapat digunakan sebagai kelengkapan hasil analisis. Lama waktu pelaksanaan wawancara diharapkan kurang lebih dua jam dan bila dipandang perlu informasi lebih akan digunakan teknik wawancara mendalam sebagai penggali permasalahan yang tidak ada pertanyaan dalam kuesioner yang disiapkan. Wawancara mendalam dilakukan kepada para kepala bidang PNF, dinas pendidikan kabupaten/kota atau ketua KK Data Dik. Wawancara mendalam lanjutan dengan para pihak lain di daerah seandainya mereka memiliki informasi yang relevan terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data PNF tahunan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Teknis analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendataan PNF. Teknik ini digunakan mengingat judul penelitian sudah sangat kecil untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Kuesioner yang telah terisi kemudian diolah menjadi tabel-tabel distribusi frekuensi. Kuesioner terdiri atas tujuh jenis variabel yang telah disusun dan diasumsikan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengumpulan data PNF tahunan.

Analisis data dilaksanakan dengan melihat banyaknya jawaban terhadap setiap variabel data rangkuman data dari 20 responden. Dengan

adanya analisis tersebut diharapkan akan terungkap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengumpulan data PNF tahunan. Analisis ini menggunakan skala 0-100, makin kecil nilainya berarti makin mempengaruhi. Sebaliknya, makin besar nilainya berarti makin tidak mempengaruhi. Untuk kemudahan interpretasi diberi skala analisis seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Standar Penilaian

No	Nilai	Arti Nilai
1	0-20%	sangat mempengaruhi sekali
2	21-40%	sangat mempengaruhi
3	41-60%	cukup mempengaruhi
4	61-80%	sedikit mempengaruhi
5	81-100%	tidak mempengaruhi

Standar yang diberikan diasumsikan bahwa bila seperlima telah tercapai, maka dianggap tidak mempengaruhi, nilai dua per lima sampai empat per lima dianggap cukup mempengaruhi, sedangkan nilai kurang dari seperlima dianggap sangat mempengaruhi sekali.

Hasil dan Pembahasan

Profil Kabupaten / Kota Sampel

Karakteristik kabupaten/kota sampel diperlukan untuk mengetahui gambaran kabupaten/kota sebagai daerah pengumpul data PNF. Karakteristik ini memberikan gambaran tipologi suatu daerah yang ingin diketahui permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pengumpulan kuesioner PNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Karakteristik yang digambarkan meliputi pulau, provinsi, kabupaten atau kota, letak geografis, jabatan responden, tingkat pendidikan responden, dan jenis bidang. Asumsinya, semua dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih memiliki pendataan PNF tahunan.

Berdasarkan tujuh pulau yang ada di Indonesia, lima pulau (71,4%) menjadi sampel. Hal ini berarti, dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 12 provinsi (36,4%) dijadikan sebagai sampel. Sampel dari lokasi Jawa sebanyak 10 kabupaten/kota (50%), Sumatera hanya diambil 3 kabupaten/kota (15%), Kalimantan diambil 2 kabupaten/kota (10%), Sulawesi hanya 2 kabupaten/kota (10%), dan

Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 kabupaten/kota (15%). Dari 497 kabupaten/kota, terdapat 20 kabupaten/kota (4,0%) sebagai responden. Dari 20 responden, 6 responden (30%) dari kota dan 14 responden (70%) dari kabupaten.

Berdasarkan jenis jabatan responden, eselon 4 merupakan jabatan yang terbanyak yang dipandang oleh responden, yaitu sebanyak 15 orang (75%), eselon 3 sebanyak 3 orang (15%), dan staf KK Data Dik sebanyak 2 orang (10%). Tingkat pendidikan responden yang terbanyak ialah sarjana/S1, yaitu berjumlah 14 orang (70%), S2 dan lebih serta SMA masing-masing 3 orang (15%). Kebanyakan responden merupakan orang-orang yang berasal dari bidang PNF, sebanyak 17 orang (85%) dan selebihnya 3 orang (15%) berasal dari bidang non-PNF.

Variabel Data

Berdasarkan variabel yang dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas digunakan tujuh variabel.

Pertama, pemahaman pendataan sebanyak 17 item data, yang terdiri atas: 1) program-program PNF, 2) variabel data PNF, 3) tahapan pendataan, 4) frekuensi pendataan, 5) pengiriman instrumen dan pengiriman kembali instrumen, 6) kapan menerima, 7) kapan mengirimkan, 8) mendata semua program, 9) ketersediaan data Dinas, 10) kemudahan data diisi, 11) jenis data yang diisi, 12) sumber data, 13) instrumen Balitbang, 14) hasil pengolahan, 15) statistik PNF, 16) kegunaan data PNF, dan 17) tingkat pemahaman.

Kedua, sumber daya manusia sebanyak delapan item data, yang terdiri atas: 1) sumber daya manusia yang menangani, 2) ketersediaan sumber daya manusia, 3) tingkat pendidikan, 4) status kepegawaian, 5) lama mengelola, 6) pelatihan, 7) jenis pekerjaan, dan 8) ketersediaan pengelola.

Ketiga, dukungan dinas pendidikan kabupaten/kota sebanyak tujuh item, yang terdiri atas: 1) struktur organisasi, 2) fungsi pendataan, 3) kelompok kerja pendataan pendidikan, 4) prioritas anggaran, 5) pendataan PNF, 6) kebijakan, dan 7) dukungan pimpinan.

Keempat, dana sebanyak empat item, yang terdiri atas: 1) kecukupan dana, 2) sumber dana, 3) honor pengelola, dan 4) ketersediaan dana.

Kelima, infrastruktur sebanyak lima item, yang terdiri atas: 1) jumlah komputer, 2) ketersediaan komputer, 3) proses pengolahan, 4) pangkalan data pendidikan berbasis web, dan 5) ketersediaan infrastruktur.

Keenam, monitoring dan evaluasi sebanyak empat item, yang terdiri atas: 1) adanya monitoring dan evaluasi, 2) frekuensi monitoring dan evaluasi, 3) hasil monitoring dan evaluasi, dan 4) pengaruh monitoring dan evaluasi.

Ketujuh, kondisi geografis sebanyak enam item, yang terdiri atas: 1) kondisi umum, 2) lokasi PNF, 3) jarak ke PNF, 4) akses jalan ke PNF, 5) transportasi, dan 6) pengaruh kondisi.

Analisis

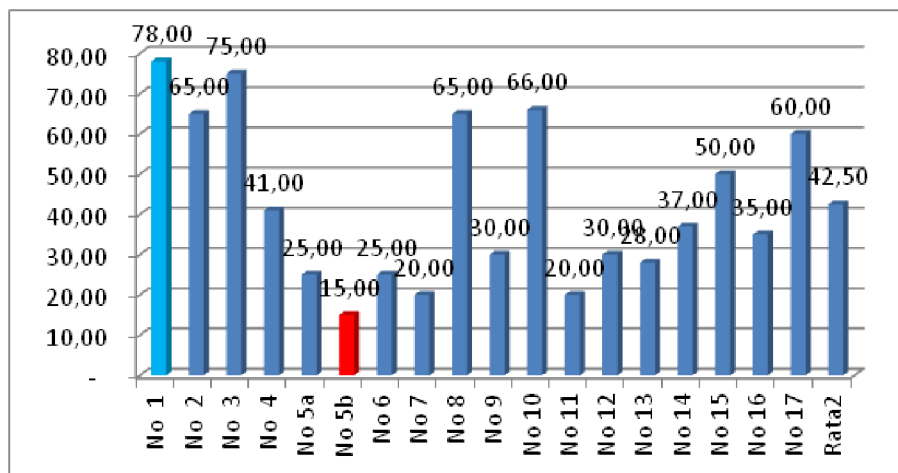
Seperti yang dijelaskan pada metodologi, untuk analisis dilakukan melalui rangkuman dari seluruh responden berdasarkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Dengan menggunakan teknik analisis dengan standar penilaian pada Tabel 2, diketahui bahwa makin kecil nilainya, semakin mempengaruhi dan makin besar nilainya makin tidak mempengaruhi. Contohnya, bila hasilnya adalah di bawah 20%, berarti sangat mempengaruhi sekali, 21-40% berarti sangat mempengaruhi, 41-60% berarti cukup mempengaruhi, 61-80% berarti sedikit mempengaruhi, sedangkan 81-100% berarti tidak mempengaruhi.

Rangkuman Seluruh Responden

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa dari segi pemahaman pendataan yang terdapat pada Grafik 1, responden yang paling banyak menjawab adalah berkaitan dengan pertanyaan program-program PNF sebesar 78,00%. Hal ini berarti sebagian besar responden memahami program-program PNF dan dianggap sedikit mempengaruhi. Sebaliknya, responden yang paling sedikit menjawab ialah berkaitan dengan pertanyaan pengiriman instrumen kembali sebesar 15,00%. Hal ini berarti hanya sebagian kecil responden yang memahami pengiriman instrumen kembali ke pusat dan dianggap sangat

mempengaruhi sekali. Dari 17 butir pertanyaan, rata-rata tingkat pemahamannya hanya sebesar 42,50%. Hal ini berarti pemahaman tentang pendataan dan khususnya pengumpulan data PNF secara menyeluruh sangat kurang, sehingga

Hal ini berarti status kepegawaian sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari delapan item pertanyaan, maka rata-rata untuk sumber daya manusia sebesar 41,25%. Hal ini berarti sumber daya manusia pendidikan cukup



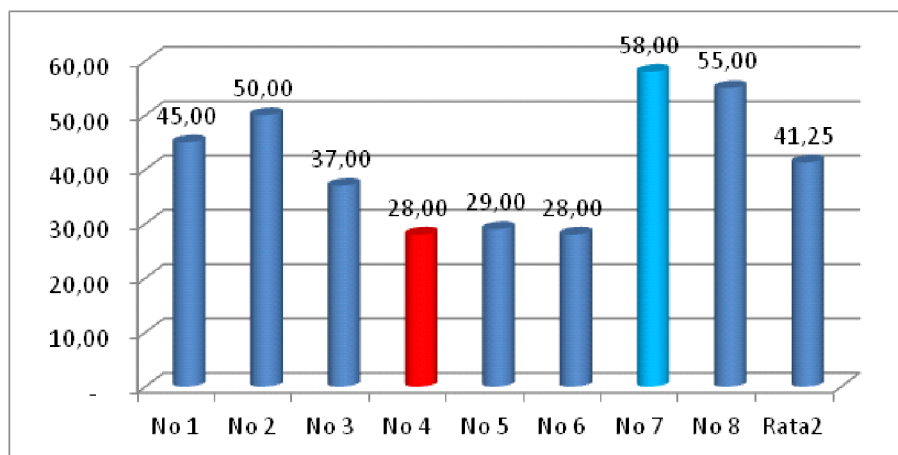
Grafik 1. Pemahaman Pendataan, Tahun 2010

cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

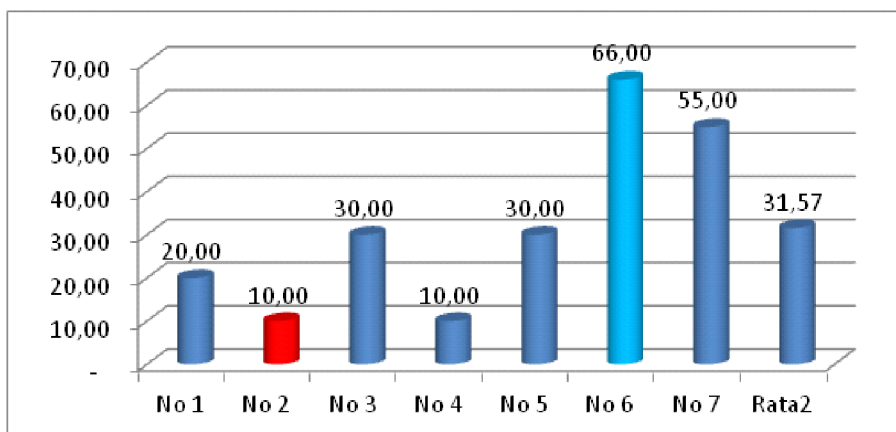
Grafik 2 menunjukkan bahwa dari segi sumber daya manusia, responden yang menjawab terbanyak yakni berkaitan dengan pertanyaan jenis pekerjaan yang dilakukan petugas pendataan sebesar 58,00%. Hal ini berarti jenis pekerjaan sudah sesuai, sehingga sedikit mempengaruhi. Jawaban responden paling sedikit yakni berkaitan dengan pertanyaan status kepegawaian yang bervariasi sebesar 28,00%.

mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 3 menunjukkan bahwa dari segi dukungan pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota, responden yang menjawab terbanyak yakni berkaitan dengan pertanyaan kebijakan pimpinan terhadap pendataan PNF sebesar 66,00%. Hal ini berarti dukungan pimpinan sudah cukup, sehingga sedikit mempengaruhi. Jawaban responden paling sedikit yakni berkaitan dengan pertanyaan pembentukan kelompok kerja pendataan



Grafik 2. Sumber Daya Manusia, Tahun 2010



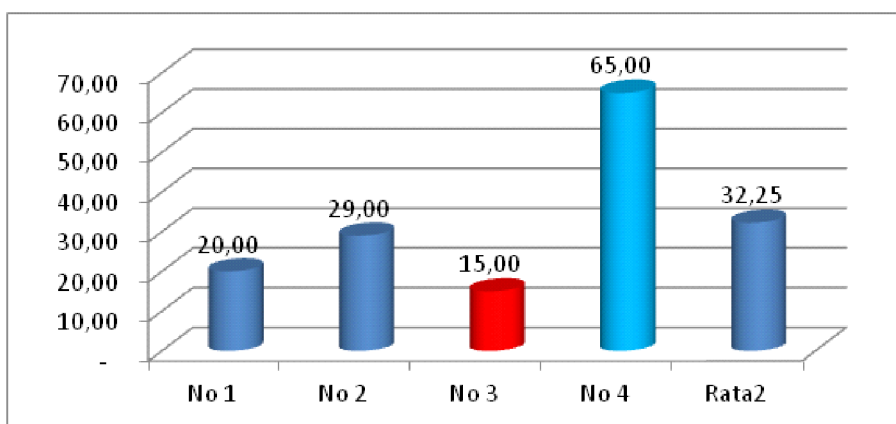
Grafik 3. Dukungan Pimpinan Dinas Pendidikan, Tahun 2010

pendidikan hanya sebesar 10,00%. Hal ini berarti tak semua responden membentuk KK Data Dik, akibatnya sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari tujuh item pertanyaan, menunjukkan rata-rata dukungan pimpinan dinas pendidikan sebesar 32,25%. Hal ini berarti pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota tidak mendukung pendataan PNF, sehingga sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF menjadi tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

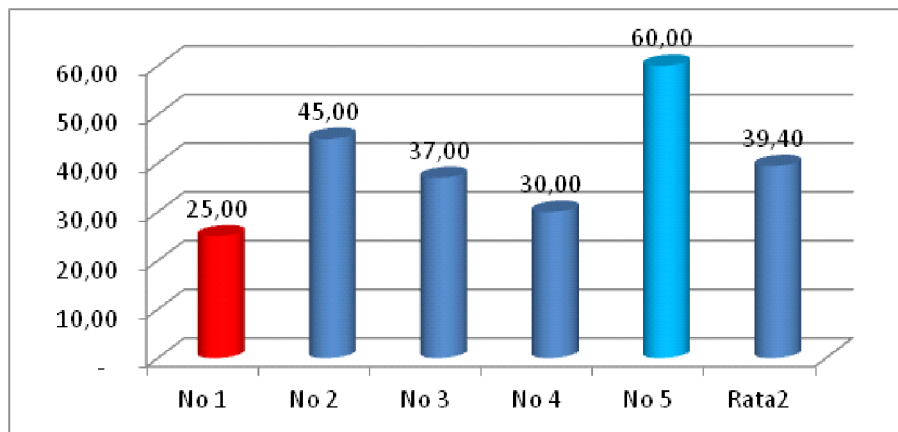
Grafik 4 menunjukkan bahwa dari segi dana, responden yang menjawab paling banyak, yakni berkaitan dengan pada pertanyaan ketersediaan dana mempengaruhi ketepatan dan kualitas PNF sebesar 65%. Hal ini berarti dana sedikit mempengaruhi pendataan PNF. Jawaban responden paling kecil, yakni berkaitan dengan pertanyaan tenaga pengelola PNF mendapatkan honorarium hanya sebesar 15%. Hal ini berarti pengelola PNF tidak pernah mendapatkan

honorarium, sehingga sangat mempengaruhi sekali. Dari empat item pertanyaan, menunjukkan bahwa rata-rata untuk dana sebesar 32,25% jauh dari separuh. Hal ini berarti ketidaktersediaannya dana sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 5 menunjukkan bahwa dari segi infrastruktur, responden yang menjawab paling banyak, yakni berkaitan dengan pertanyaan ketersediaan infrastruktur mempengaruhi ketepatan dan kualitas PNF sebesar 60%. Hal ini berarti infrastruktur cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF. Jawaban responden paling sedikit berkaitan dengan pertanyaan adanya komputer hanya sebesar 25%. Hal ini berarti adanya komputer sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari lima item pertanyaan, menunjukkan bahwa rata-rata untuk infrastruktur sebesar 39,40% jauh dari separuh. Hal ini berarti ketidaktersediaan infrastruktur sangat mem-



Grafik 4. Dana, Tahun 2010



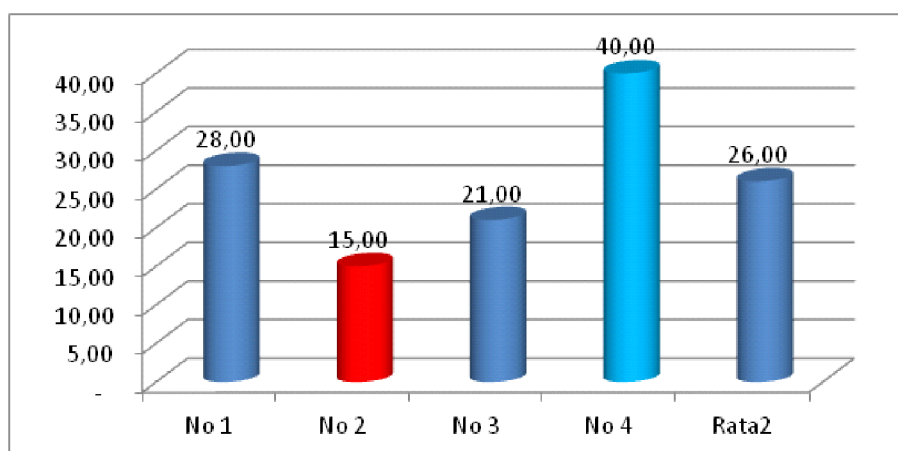
Grafik 5. Infrastruktur, Tahun 2010

pengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 6 menunjukkan bahwa dari segi monitoring dan evaluasi, responden yang menjawab paling banyak berkait dengan pertanyaan adanya monitoring dan evaluasi mempengaruhi ketepatan dan kualitas PNF sebesar 40%. Hal ini berarti monitoring sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Jawaban responden paling sedikit berkait dengan pertanyaan frekuensi hanya sebesar 15%. Hal ini berarti monitoring yang sangat kecil sangat mempengaruhi sekali pengumpulan data PNF. Dari empat item pertanyaan, maka rata-rata untuk monitoring dan evaluasi hanya sebesar 26% sangat jauh dari separuh atau hanya seperempat. Hal ini berarti tidak adanya monitoring dan evaluasi sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 7 menunjukkan bahwa dari segi kondisi geografis, responden yang menjawab paling banyak berkaitan dengan pertanyaan adanya akses jalan menuju ke program PNF sebesar 65%. Hal ini berarti akses jalan sedikit mempengaruhi pengumpulan data PNF. Jawaban responden paling sedikit berkait dengan pertanyaan rata-rata jarak ke program PNF sebesar 6-10 km yang dapat dijangkau hanya sebesar 30%. Hal ini berarti program PNF yang jauh dari lokasi dinas pendidikan kabupaten/kota sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari enam item pertanyaan, menunjukkan rata-rata untuk kondisi geografis hanya sebesar 44,26% responden, yang berarti kurang dari separuh. Hal ini berarti kondisi geografis juga cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

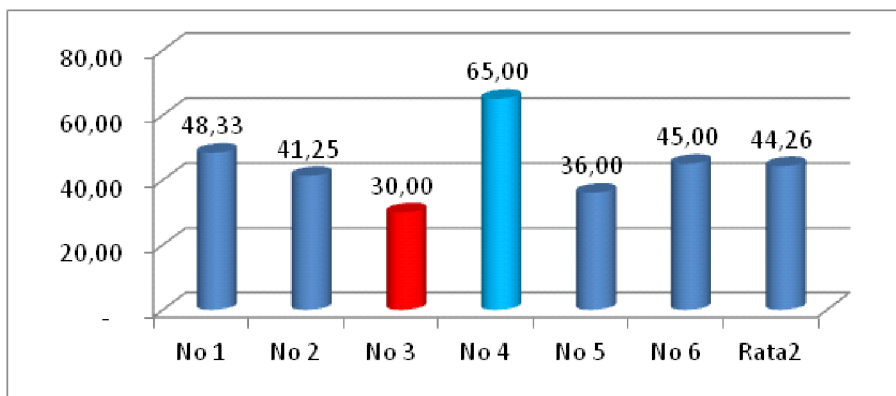
Grafik 8 menunjukkan bahwa dari tujuh faktor yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak



Grafik 6. Monitoring dan Evaluasi, Tahun 2010

tepat waktu dan tidak berkualitas, yang berarti kondisi geografis ternyata memiliki nilai terbesar jika dibandingkan dengan item pertanyaan lainnya karena dijawab sebesar 44,36% responden. Namun, masih termasuk dalam kategori cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF. Hal yang sama untuk pemahaman, sumber daya manusia, dan infrastruktur sekitar 40% responden. Hal ini berarti sangat mempengaruhi dalam pengum-

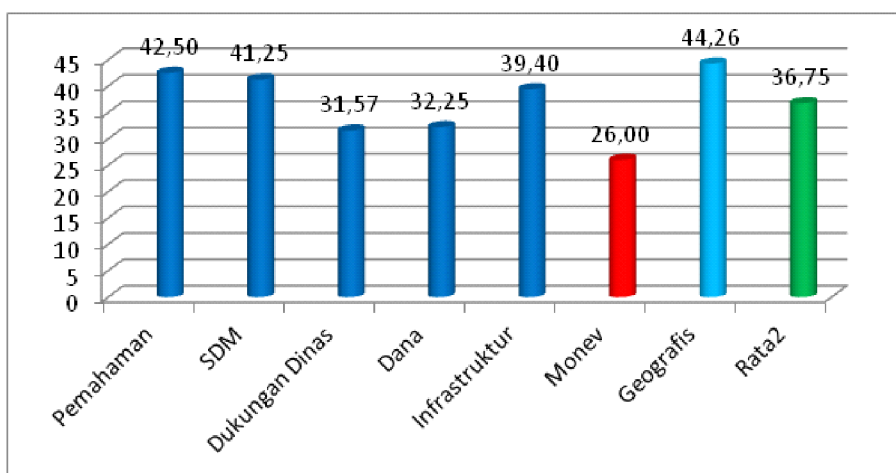
Dengan melihat kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa ketujuh faktor yang diduga mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas memang terbukti. Hal ini ditunjukkan secara kuantitatif, bahwa nilai yang diperoleh dalam analisis data yang dikumpulkan menunjukkan nilai sebesar 36,75% termasuk dalam kategori sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Monitoring dan evaluasi memiliki



Grafik 7. Kondisi Geografis, Tahun 2010

pulan data PNF. Jawaban responden terkecil, yakni monitoring dan evaluasi sebesar 26% responden. Hal ini berarti monitoring sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dari 7 item pertanyaan menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 36,75%. Hal ini berarti ketujuh item pertanyaan sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

nilai terkecil sebesar 26,00% berarti sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Sebaliknya, faktor geografis memiliki nilai terbesar sebesar 44,26% cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.



Grafik 8. Rangkuman ke-7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Tahun 2010

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan rangkuman dari seluruh responden, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (41,25%), pemahaman (42,50%), dan keadaan geografis (44,26%) termasuk dalam kategori cukup mempengaruhi dalam pengumpulan data PNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Sebaliknya, terdapat empat faktor lainnya, yaitu dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota (26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana (32,25%), dan infrastruktur (39,40%) ternyata sangat mempengaruhi, sehingga pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Rata-rata ketujuh variabel yang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas hanya sebesar 36,75% atau masuk dalam kategori sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF. Dengan melihat nilai rata-rata ini, dapat dikatakan bahwa ketujuh faktor tersebut memang sangat mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan agar dilakukan monitoring dan evaluasi dalam

pendataan PNF pada tingkat satuan pendidikan sampai kabupaten/kota, sehingga diharapkan isian kuesioner yang mereka lakukan lebih berkualitas dan sesuai dengan permintaan. Dukungan dari pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam pendataan dan pengelola PNF karena pendataan PNF juga diperlukan untuk bahan kebijakan.

Selain itu, perlu adanya dukungan dana untuk pendataan PNF dari tingkat satuan pendidikan sampai kabupaten/kota karena ternyata tidak ada honor untuk pendataan PNF maupun pengelola data PNF. Perlu diusulkan agar pendataan PNF juga dimasukkan dalam pendataan sekolah yang dilaksanakan oleh KK Data Dik. Hal yang sama untuk infrastruktur supaya ditingkatkan, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam hal kuantitas perlu dilakukan penambahan komputer sebagai alat pengolah data karena bidang PNF tidak memiliki komputer khusus. Selain itu, perlu disusun program aplikasi yang memudahkan seperti program *Excel* karena hampir semua petugas dapat mengoperasikan program tersebut. Dalam hal kualitas maka spesifikasi komputer yang dimiliki supaya ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Indonesia, 2010*. Jakarta.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design. Edisi Kedua*. California: Sage Publication.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. *Pendataan Pendidikan*. Bahan Pelatihan pada Tingkat Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010b. *Penyusunan Indikator*. Bahan Pelatihan pada Tingkat Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen Dikdasmen.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010c. *Profil Pendidikan Nonformal Kabupaten/Kota Tahun 2009 2010*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010d. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional*. Jakarta.